

**PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH SEKTOR PUBLIK
TERHADAP PEREKONOMIAN DI SUMATERA BARAT**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



OLEH :

NANA YELITA
NIM: 13604/2009

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2015**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH SEKTOR PUBLIK
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI SUMATERA BARAT

Nama : NANA YELITA
BP/NIM : 2009/13604
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Keahlian : Ekonomi Publik
Fakultas : Fakultas Ekonomi
Universitas : Universitas Negeri Padang

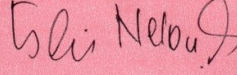
Padang, Februari 2015

Disetujui Oleh

Pembimbing I


Dr. Hasdi Aimon, M.Si
NIP. 19550505 197903 1 010

Pembimbing II


Selli Nelonda, SE, M.Sc
NIP. 19830506 200604 2 001

Mengetahui,
Ketua Prodi Ekonomi Pembangunan


Drs. Ali Anis, MS
NIP. 19591129 198602 1 001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

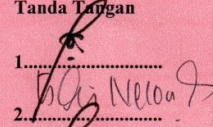
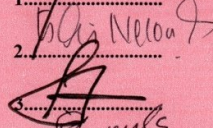
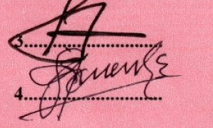
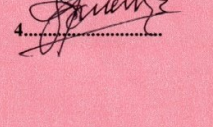
**Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang**

**PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH SEKTOR PUBLIK
TERHADAP PEREKONOMIAN DI SUMATERA BARAT**

**Nama : NANA YELITA
TM/NIM : 2009/13604
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Keahlian : Ekonomi Publik
Fakultas : Ekonomi**

Padang, Februari 2015

Tim Penguji

No. Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	: Dr. Hasdi Aimon, M.Si	1..... 
2. Sekretaris	: Selli Nelonda, SE, M.Sc	2..... 
3. Anggota	: Drs. Ali Anis, M.S	3..... 
4. Anggota	: Drs. Akhirmen, M.Si	4..... 

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nana Yelita
NIM/Thn. Masuk : 13604/2009
Tempat/Tgl Lahir : Simp. Candung/15 Juni 1990
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Keahlian : Ekonomi Publik
Fakultas : Ekonomi
Judul Skripsi : Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Publik terhadap Perekonomian Sumatera Barat

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis/skripsi saya ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Negeri Padang maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah, dengan cara menyebut nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/ skripsi ini sah apabila telah ditandatangani **Asli** oleh tim pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka Saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis/ skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Padang, Desember 2014
Yang menyatakan



Nana Yelita
13604/2009

ABSTRAK

Nana Yelita (2009/13604) : Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Publik terhadap Perekonomian di Sumatera Barat. Program Studi Ekonomi Pembangunan. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Padang. Dibawah bimbingan Bapak Dr. Hasdi Aimon, M.Si dan Ibu Selli Nelonda, SE,M.Sc.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan kausalitas antara pengeluaran sektor publik dan perekonomian di Sumatera Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) kausalitas antara pengeluaran sektor pendidikan dan perekonomian Sumatera Barat, (2) kausalitas antara pengeluaran sektor kesehatan dan perekonomian Sumatera Barat, (3) kausalitas antara pengeluaran sektor infrastruktur dan perekonomian Sumatera Barat. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dan asosiatif, dan data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder berbentuk *time series* dari tahun 1982-2013. Teknik analisa data dengan menggunakan metode VAR (*Vector Auto Regression*).

Hasil penelitian ini adalah (1) terdapat hubungan satu arah antara pengeluaran sektor pendidikan dan perekonomian Sumatera Barat yaitu hanya perekonomian yang mempengaruhi pengeluaran sektor pendidikan dan tidak sebaliknya, (2) terdapat hubungan satu arah antara pengeluaran sektor pendidikan dan perekonomian Sumatera Barat yaitu hanya perekonomian yang mempengaruhi pengeluaran sektor kesehatan dan tidak sebaliknya, (3) terdapat hubungan satu arah antara pengeluaran sektor infrastruktur dan perekonomian Sumatera Barat yaitu hanya perekonomian yang mempengaruhi pengeluaran sektor pendidikan dan tidak sebaliknya.

Kata kunci: Pengeluaran Pemerintah Sektor Publik, Perekonomian, Analisis VAR

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada kita semua. Berkat rahmat dan karuniaNya pulalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dalam rangka mendapatkan gelar Sarjana di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Selanjutnya penulis mengutarakan rasa terima kasih yang sangat mendalam kepada Ayah dan Ibu yang telah memberikan dukungan kepada penulis yang tak pernah bosan dan lelah mengiringi langkah penulis dalam mencapai cita-cita dunia dan akhirat sampai saat ini. Dukungan moril dan materil yang tidak akan terbalaskan oleh penulis kepada Ayah dan Ibu tersayang.

Dalam menyelesaikan Skripsi ini tentu penulis banyak menemui kesulitan-kesulitan yang tidak dapat diselesaikan sendiri. Namun melalui pembimbing dan staf pengajar di Fakultas Ekonomi penulis dapat mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi, sehingga pada akhirnya penulisan Skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Hasdi Aimon, M.Si selaku pembimbing I sekaligus Pembimbing Akademik dan Ibuk Selli Nelonda, SE.,M.Sc sebagai pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini. Selanjutnya selesainya Skripsi ini tidak terlepas pula dari dukungan dan bantuan dari semua pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Yunia Wardi, M.Si selaku dekan Fakultas Ekonomi yang telah memberi izin pada peneliti dalam melakukan penelitian.

2. Bapak Drs. Ali Anis, MS selaku ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan yang telah memberikan fasilitas dan kesempatan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Bapak Drs. Ali Anis, MS dan Bapak Drs. Akhirmen, M.Si sebagai peguji yang telah memberikan masukan dan saran untuk perbaikan serta penyelesaian tugas akhir ini.
4. Bapak dan Ibu dosen staf pengajar pada Fakultas Ekonomi yang telah memberikan sumbangan pikirannya selama perkuliahan demi terwujudnya tugas akhir ini.
5. Bapak Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat beserta staf yang telah membantu memberikan izin dan kemudahan kepada penulis dalam pengambilan data penelitian ini.
6. Teman–teman seperjuangan yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak luput dari segala kekurangan dan kesalahan, untuk itu saran dan kritikan yang sifatnya membangun dari pembaca untuk perbaikan dimasa yang akan datang sangat penulis harapkan. Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Alhamdulillah yang dapat penulis ucapkan sebagai penutup semua aktivitas dalam penulisan tugas akhir ini.

Padang, Februari 2015

Penulis,

Nana Yelita
NIM. 13604

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan dan Manfaat Penelitian	10
BAB II. KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS	
A. Kajian Teori	12
1. Peran Pemerintah dalam Perekonomian.....	12
a. Peran Alokasi	14
b. Peran Distribusi.....	15
c. Peran Stabilisasi	15
2. Teori Pengeluaran Pemerintah.....	16
a. Teori Keynes	16
3. Pengeluaran Sektor Publik.....	18
4. Penelitian Sejenis.....	23
B. Kerangka Konseptual	24
C. Hipotesis.....	26
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	27
B. Tempat dan Waktu Penelitian	27

C. Jenis dan Sumber Data	28
D. Variabel Penelitian	28
E. Teknik Pengumpulan Data	29
F. Defenisi Operasional	29
G. Teknik dan Analisis Data	30
1. Analisis Deskriptif	30
2. Analisis Induktif	31
a. Analisis <i>Vektor Auto Regression</i> (VAR)	31
b. Model Empiris Analisis <i>Vektor Auto Regression</i> (VAR)	32
c. Langkah-langkah Analisis <i>Vektor Auto Regression</i> (VAR)	34
d. Implementasi Model VAR	38
e. Uji Hipotesis	39

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	42
1. Gambaran umum Daerah Penelitian	42
2. Deskripsi Variabel Penelitian	45
3. Analisis <i>Vektor Auto Regresion</i>	56
4. Hasil Implementasi Model VAR	64
B. Pembahasan	73

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan	80
B. Saran	81

DAFTAR PUSTAKA	83
-----------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Kondisi Perekonomian Sumatera Barat Tahun 2002-2013.....	5
1.2 Pengeluaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Sektor Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur dan Keamanan Tahun 2000-2013	7
4.1 Perkembangan Perekonomian Sumatera Barat ADHK Tahun 1982-2013.....	46
4.2 Perkembangan Pengeluaran Sektor Pendidikan Tahun 1982-2013	48
4.3 Perkembangan Pengeluaran Sektor Kesehatan Tahun 1982-2013.....	51
4.4 Perkembangan Pengeluaran Sektor Infrastruktur Tahun 1982-2013	53
4.5 Hasil Uji Stasioner dengan Metode ADF.....	57
4.6 Kriteria Penentuan Panjang Lag Optimal	58
4.7 Hasil Uji Kausalitas Granger	58
4.8 Estimasi VAR antara PDRB dan Pengeluaran Pendidikan.....	61
4.9 Estimasi VAR antara PDRB dan Pengeluaran Kesehatan	62
4.10 Estimasi VAR antara PDRB dan Pengeluaran Infrastruktur.....	63
4.11 Variance Decomposition PDRB dan Pengeluaran Pendidikan.....	69
4.12 Variance Decomposition PDRB dan Pengeluaran Kesehatan	71
4.13 Variance Decomposition PDRB dan Pengeluaran Infrastruktur.....	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Perpotongan Keynesian.....	17
2.2 Kerangka Konseptual	26
4.1 IRF antara PDRB dan Pengeluaran Pendidikan.....	65
4.2 IRF antara PDRB dan Pengeluaran Kesehatan	66
4.3 IRF antara PDRB dan Pengeluaran Infrastruktur.....	67

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. PDRB, Pengeluaran pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur	85
2. Uji Stasioner	86
3. Panjang Lag Optimum	92
4. Uji Kausalitas Granger	93
5. Estimasi VAR	94
6. Tabel T	95

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mencapai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, menjaga kestabilan harga, mengatasi masalah pengangguran, menjaga keseimbangan neraca pembayaran dan pendistribusian pendapatan yang lebih adil dan merata merupakan tujuan utama pembangunan ekonomi. Melalui pembangunan ini diharapkan akan terjadi peningkatan kemakmuran masyarakat secara bertahap dan berkesinambungan.

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat maka sangat dibutuhkan peranan pemerintah. Apabila perekonomian sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar maka akan sangat peka terhadap goncangan dan bisa berdampak pada peningkatan pengangguran dan terjadinya inflasi. Untuk itu sangat dibutuhkan campur tangan pemerintah dalam perekonomian dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang menyangkut kehidupan masyarakat. Alasan perlunya campur tangan pemerintah dalam perekonomian adalah untuk mencegah kekuatan-kekuatan monopoli, penyediaan barang publik, mewujudkan keadilan, mengarahkan perekonomian menuju keseimbangan, dan menjaga keamanan (Guritno:2001).

Peranan atau campur tangan pemerintah tersebut terlihat dari fungsi pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah praktis dapat mempengaruhi aktivitas ekonomi pada umumnya, bukan saja karena pengeluaran ini dapat menciptakan berbagai prasarana yang dibutuhkan dalam proses pembangunan,

tetapi juga merupakan salah satu komponen dari permintaan agregat yang kenaikannya akan mendorong produksi domestik.

Dalam teori ekonomi pembangunan diketahui bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah mempunyai hubungan timbal balik yang positif. Aliran Keynesian menunjukkan bahwa pembelanjaan pemerintah memacu pertumbuhan ekonomi. Pandangan ini menjelaskan bahwa dengan meningkatnya pengeluaran pemerintah akan mendorong peningkatan permintaan berbagai barang dan jasa yang diproduksi perekonomian secara agregat, sehingga mendorong pertumbuhan perekonomian, jadi pengeluaran pemerintah dipandang sebagai kekuatan eksogenus yang mengubah output agregat. Dengan kata lain, dalam kasus ini pertumbuhan ekonomi merupakan fungsi dari pengeluaran pemerintah. Sebaliknya, Hukum Wagner “hukum meningkatnya ekspansi aktivitas publik” menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi sebagai determinan utama pertumbuhan sektor publik (Wagner dalam Mankiw, 2007) yang berarti pengeluaran pemerintah merupakan fungsi dari pertumbuhan ekonomi. Analogi untuk hubungan ini adalah dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, maka tingkat penerimaan pemerintah dari sektor pajak juga meningkat yang akhirnya meningkatkan pengeluaran pemerintah. Selain itu pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga mencerminkan semakin besarnya kebutuhan layanan jasa pemerintah, sehingga dibutuhkan anggaran pemerintah yang semakin besar pula.

Pengeluaran pemerintah yang paling utama untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yaitu pengeluaran di sektor publik, seperti pengeluaran sektor pendidikan, pengeluaran sektor kesehatan dan pengeluaran sektor infrastruktur.

Pengeluaran pemerintah di sektor publik sangat berguna untuk pembentukan modal sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk dapat menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas maka dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai terutama dibidang pendidikan, dengan begitu segala sesuatu yang dibutuhkan untuk memperlancar proses belajar dan mengajar terpenuhi dengan baik. Maka dari itu dibutuhkan peran dan campur tangan pemerintah untuk memenuhinya, agar pelayanan pendidikan terpenuhi dengan baik.

Selain pendidikan, kesehatan juga sangat penting dalam pembentukan modal manusia. Kesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia, tanpa kesehatan manusia tidak dapat berbuat banyak. Kesehatan merupakan inti dari kesejahteraan, masyarakat yang sehat dapat melakukan segala aktifitas serta dapat menuntut ilmu pendidikan. Tanpa kesehatan yang memadai masyarakat tidak mungkin dapat memperoleh pendidikan. Jadi pendidikan dan kesehatan merupakan inti utama pembentukan modal manusia. Oleh sebab itu pemerintah juga harus memperhatikan pengeluarannya untuk sektor kesehatan.

Pembentukan dan perbaikan modal manusia juga tergantung pada tersedianya infrastruktur untuk menunjang investasi pada sumber daya manusia. Tak bisa dipungkiri bahwa infrastruktur merupakan salah satu faktor penunjang keberhasilan perekonomian suatu daerah. Diantara infrastruktur yang sangat penting dalam menunjang perekonomian dan yang sangat dibutuhkan masyarakat yaitu perumahan dan transportasi. Perumahan yang layak akan membuat kualitas hidup masyarakat menjadi lebih baik, sehingga masyarakat dapat melaksanakan kegiatannya sehari-hari. Jaringan transportasi yang baik akan melancarkan

distribusi kegiatan ekonomi dan secara jangka panjang dapat menjadi media pemerataan pembangunan.

Menurut Deni (dalam Desi: 2010) ada tiga alasan utama mengapa infrastruktur penting dalam sebuah integrasi ekonomi. Alasan pertama yaitu ketersediaan infrastruktur yang baru merupakan mesin utama pembangunan ekonomi. Kedua, untuk memperoleh manfaat yang penuh dari integrasi, ketersediaan jaringan infrastruktur sangat penting dalam memperlancar aktivitas perdagangan dan investasi. Ketiga, perhatian terhadap perbaikan infrastruktur juga untuk mengatasi kesenjangan pembangunan antar negara. Infrastruktur terdiri dari beberapa subsektor, dan infrastruktur yang penting untuk menunjang kehidupan masyarakat yaitu perumahan dan transportasi.

Semenjak berlakukannya otonomi daerah maka terjadi peningkatan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan yaitu penyediaan barang publik dan pembangunan ekonomi ditingkat daerah yang cukup besar. Namun kemampuan daerah untuk mempertahankan dan meningkatkan pembangunan ekonomi dapat dikatakan sangat terbatas, mengingat peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih rendah, dan kesiapan sumber daya manusia tingkat daerah yang masih terbatas serta penurunan bantuan dari pemerintah pusat.

Sebagai daerah otonom pemerintah Provinsi Sumatera Barat berupaya untuk meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakatnya dengan cara mengoptimalkan pendapatan dan pengeluarannya seefisien mungkin. Karena peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat merupakan tolak ukur keberhasilan serta ukuran untuk melihat dan menilai hasil kinerja pemerintah

dalam perekonomian. Seperti terlihat pada tabel 1.1 perekonomian Sumatera Barat setiap tahun mengalami peningkatan, namun dari sisi pengeluarannya masih kecil terutama pengeluaran untuk sektor publik.

Tabel 1.1
Kondisi Perekonomian Sumatera Barat Tahun 2000-2013

Tahun	PDRB	Pert
2000	22.889.614.050.000	3.34
2001	23.727.373.930.000	3.53
2002	24.840.187.760.000	4.47
2003	26.146.781.640.000	4.99
2004	27.578.136.560.000	5.19
2005	29.159.480.530.000	5.42
2006	30.949.945.110.000	5.78
2007	32.912.968.590.000	5.96
2008	35.176.632.420.000	6.43
2009	36.683.238.680.000	4.10
2010	38.860.187.680.000	5.60
2011	41.276.406.360.000	5.85
2012	43.912.000.040.000	6.00
2013	46.640.235.570.000	5.84
Rata2	23.234.585.701.996	5.14

Sumber: Badan Pusat Statistik Sumbar

Pada Tabel 1.1 terlihat bahwa perekonomian Sumatera Barat dalam empat belas tahun terakhir dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan sedangkan laju pertumbuhan ekonominya berfluktuatif. Laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat paling tinggi yaitu pada tahun 2008 sebesar 6,43% dan laju pertumbuhan ekonomi paling rendah yaitu tahun 2001 sebesar 3,53%, rata-rata pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat setiap tahunnya sebesar 5.14%.

Hal ini membuktikan adanya keseriusan pemerintah Sumatera Barat dalam mengelola keuangannya dan mengoptimalkan pendapatannya dari sembilan sektor lapangan usaha sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonominya setiap

tahun. Namun peningkatan PDRB Sumatera Barat ini dari tahun ketahun masih didukung oleh tiga sektor utama yaitu sektor pertanian, sektor perdagangan dan sektor hotel dan jasa-jasa (BPS Sumbar).

Peningkatan dan pertumbuhan perekonomian Sumatera Barat ini akan membawa pengaruh yang positif terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat. Melalui kewenangan yang dimilikinya untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, pemerintah daerah harus berupaya memaksimalkan sumberdaya yang ada di daerahnya terutama dalam mempersiapkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan kesediaan sarana dan prasarana yang mendukung serta rasa keaman dalam masyarakat. Dengan begitu para pelaku ekonomi akan lebih tertarik untuk berinvestasi di Sumatera Barat.

Walaupun perekonomian Sumatera Barat setiap tahunnya meningkat, namun kondisi pengeluaran pemerintah di sektor publik terutama pada sektor pendidikan, sektor kesehatan dan sektor infrastruktur setiap tahunnya berfluktuatif tidak hanya mengalami peningkatan tetapi juga mengalami penurunan dan lebih banyak mengalami penurunan. Perkembangan pengeluaran pemerintah pada sektor publik seperti terlihat pada Tabel 1.2.

Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berfluktuasi setiap tahun namun cenderung mengalami peningkatan. Pengeluaran pada tahun 2001 sampai tahun 2003 mengalami penurunan, mencapai angka 19,64%. Tahun 2004 sampai tahun 2010 pengeluaran sector pendidikan kembali mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan adanya keseriusan pemerintah untuk mengelola keuangannya dalam hal pendidikan, namun pada tahun 2011 pengeluaran sektor pendidikan kembali

mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu mencapai angka -39,67. Dapat dilihat bahwa pengeluaran di sektor pendidikan lebih banyak mengalami penurunan daripada peningkatan, dan seharusnya pemerintah harus lebih bisa lagi untuk mengelola keuangannya untuk pendidikan karena pendidikan merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi.

Tabel 1.2
Pengeluaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Sektor/Bidang Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur Tahun 2000-2013 (dalam rupiah)

Tahun	Pendidikan	Pert	Kesehatan	Pert	Infrastruktur	Pert
2000	131.382.757.400	-	44.600.430.400	-	16.243.690.000	-
2001	125.506.657.440	-4.47	56.156.067.600	25.91	26.328.750.000	62.09
2002	100.854.071.720	-19.64	40.266.990.000	-28.29	19.348.110.000	-26.51
2003	90.299.364.800	-10.47	74.692.870.000	85.49	15.413.910.000	-20.33
2004	101.649.463.200	12.57	82.395.060.000	10.31	13.501.580.000	-12.41
2005	109.274.897.200	7.50	90.891.030.000	10.31	13.475.220.000	-0.20
2006	113.999.938.000	4.32	109.233.750.000	20.18	17.452.540.000	29.52
2007	122.066.360.000	7.08	124.433.150.000	13.91	28.388.830.000	62.66
2008	170.982.790.000	40.07	184.321.210.000	48.13	20.987.050.000	-26.07
2009	189.792.490.000	11.00	193.906.170.000	5.20	28.769.240.000	37.08
2010	192.445.590.000	1.40	192.400.480.000	-0.78	31.688.240.000	10.15
2011	116.107.410.000	-39.67	230.782.010.000	19.95	30.289.370.000	-4.41
2012	126.478.510.000	8.93	206.393.130.000	-10.57	38.559.750.000	27.30
2013	151.520.330.000	19.80	254.436.950.000	23.28	44.350.740.000	15.02

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Departemen Keuangan

Pengeluaran untuk sektor kesehatan dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Provinsi Sumatera Barat sangat memperhatikan pengeluaran sektor kesehatannya, namun ada beberapa pengeluaran kesehatan yang mengalami penurunan yaitu pada tahun 2002 sebesar -28,29%, tahun 2010 sebesar -0,78% dan pada tahun 2012 sebesar 10,57%. Dapat disimpulkan pengeluaran sektor kesehatan beberapa tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan dibandingkan penurunan.

Pengeluaran sektor infrastruktur cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya hal ini terlihat dari tahun 2002 sampai tahun 2004 mengalami penurunan mencapai -26,51%, pada tahun 2008 pengeluaran sektor infrastruktur juga mengalami penurunan, dan meningkat sampai tahun 2010, kembali mengalami penurunan pada tahun 2011. Dapat disimpulkan bahwa pengeluaran sektor infrastruktur mengalami penurunan daripada peningkatan.

Tabel 1.2 juga memperlihatkan bahwa realisasi pengeluaran pemerintah sektor pendidikan lebih kecil dari pada sektor kesehatan. Padahal seperti diketahui bahwa anggaran sektor pendidikan lebih besar dari sektor kesehatan, sedangkan di Provinsi Sumatera Barat realisasi pengeluaran pendidikan lebih kecil dari kesehatan. Pengeluaran sektor pendidikan pada tahun 2011 sebesar Rp. 116.107.410.000 sedangkan pengeluaran sektor kesehatan pada tahun yang sama yaitu sebesar Rp. 230.782.010.000, terlihat bahwa pengeluaran sektor kesehatan dua kali lebih besar daripada sektor pendidikan.

Dibandingkan pengeluaran sektor pendidikan, dan pengeluaran sektor kesehatan, pengeluaran sektor infrastruktur merupakan yang paling kecil pengeluarannya. Hal ini menunjukkan rendahnya perhatian pemerintah untuk sektor infrastruktur.

Dari uraian di atas ditemukan bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur akan memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini didukung oleh penelitian Niken (2010) yang meneliti tentang pengaruh pengeluaran pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi, hasilnya menunjukkan bahwa pengeluaran pendidikan sangat

berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian Rindang (2009) yang meneliti tentang pengaruh infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi, menunjukkan bahwa infrastruktur berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pengeluaran pemerintah di sektor publik terutama pengeluaran sektor pendidikan, pengeluaran sektor kesehatan dan sektor infrastruktur setiap tahunnya selalu berfluktuasi dan cenderung menurun, akan tetapi hal ini tidak berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi yang terlihat pada Tabel 1.1 yang terus mengalami peningkatan. Menurut teori pertumbuhan, apabila pengeluaran pemerintah meningkat maka pertumbuhan ekonomi juga meningkat, dengan demikian apabila pengeluaran pemerintah mengalami penurunan maka pertumbuhan ekonomi juga menurun. Di Provinsi Sumatera Barat walaupun pengeluaran pemerintah menurun pertumbuhan ekonomi tetap meningkat.

Dengan demikian peneliti tertarik untuk melakukan kajian tentang perkembangan pengeluaran pemerintah terutama pengeluaran sektor publik terhadap perekonomian serta melihat ada tidaknya hubungan timbal balik antara pengeluaran sektor publik dan perekonomian di Provinsi Sumatera Barat selama kurun waktu tahun 1982 – 2013 dengan menggunakan analisis *Vektor Auto Regression* (VAR).

B. Rumusan Masalah

Dari penyajian latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Apakah terdapat hubungan kausalitas antara pengeluaran sektor pendidikan dan perekonomian di Provinsi Sumatera Barat?
2. Apakah terdapat hubungan kausalitas antara pengeluaran sektor kesehatan dan perekonomian di Provinsi Sumatera Barat?
3. Apakah terdapat hubungan kausalitas antara pengeluaran sektor infrastruktur dan perekonomian di Provinsi Sumatera Barat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis :

1. Hubungan kausalitas antara pengeluaran sektor pendidikan dan perekonomian di Provinsi Sumatera Barat
2. Hubungan kausalitas antara pengeluaran sektor pendidikan dan perekonomian di Provinsi Sumatera Barat
3. Hubungan kausalitas antara pengeluaran sektor infrastruktur dan perekonomian di Provinsi Sumatera Barat

D. Kegunaan dan Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dan manfaat dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi penulis yaitu untuk memperdalam ilmu pengetahuan di bidang ekonomi. Dan merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

2. Bagi pembaca/peneliti yaitu sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya, agar penelitian ini bermanfaat bagi penelitian selanjutnya, tentunya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
3. Bagi pengambil kebijakan yaitu sebagai acuan atau pedoman dalam mengambil kebijakan/keputusan kearah yang lebih baik dan tepat sasaran.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Peran Pemerintah dalam Perekonomian

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting tolak ukur keberhasilan pembangunan ekonomi pada suatu negara yang menggambarkan telah terjadinya peningkatan barang dan jasa yang dihasilkan sebagai syarat yang diperlukan bagi proses pembangunan. Menurut Kuznets (Todaro, 2003), “pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Pertumbuhan ekonomi menurut Sadono Sukirno (2002) yaitu perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi digunakan untuk menggambarkan bahwa suatu perekonomian telah mengalami perkembangan ekonomi dan mencapai taraf kemakmuran yang tinggi.

Sebagai sebuah organisasi atau rumah tangga, pemerintah melakukan banyak sekali pengeluaran untuk membiayai kegiatan-kegiatannya. Pengeluaran-pengeluaran tersebut bukan saja untuk menjalankan roda pemerintahan sehari-hari. Akan tetapi juga untuk membiayai kegiatan perekonomian, dalam arti pemerintah harus menggerakkan dan merangsang kegiatan ekonomi secara umum. Pemerintah harus merintis dan menjalankan kegiatan ekonomi yang masyarakat atau kalangan swasta tidak tertarik untuk menjalankannya. Dalam kasus lain, pemerintah memandang perlu untuk menangani sendiri berbagai kegiatan

ekonomi tertentu, yang menurut penilaiannya sebaiknya tidak dijalankan oleh pihak swasta. Itulah sebabnya pemerintah melakukan berbagai pengeluaran, bahkan dalam jumlah besar.

Peranan pemerintah sangat penting dalam perekonomian, untuk meningkatkan perekonomian, pemerintah melaksanakan kebijakan fiskal. Menurut Jhingan (2012), Kebijakan fiskal sebagai sarana menggalakkan pembangunan ekonomi bermaksud mencapai tujuan berikut :

- a. Untuk meningkatkan laju investasi. Kebijakan fiskal bertujuan meningkatkan dan memacu laju investasi di sektor swasta dan sektor negara. Dalam rangka meningkatkan laju investasi, pemerintah harus menerapkan kebijaksanaan investasi berencana di sektor publik.
- b. Untuk mendorong investasi optimal secara sosial. Kebijaksanaan fiskal harus mendorong arus investasi ke jalur-jalur yang dianggap diinginkan masyarakat. Ini berkaitan dengan pola optimum investasi dan menjadi tanggung jawab dari negara untuk mendorong investasi pada overhead sosial dan ekonomi.
- c. Untuk meningkatkan kesempatan kerja. Kebijakan fiskal harus ditujukan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran atau setengah pengangguran.
- d. Untuk meningkatkan stabilitas ekonomi di tengah ketidakstabilan internasional. Kebijakan fiskal harus meningkatkan usaha mempertahankan stabilitas ekonomi menghadapi fluktuasi siklus internasional jangka pendek.

- e. Untuk menanggulangi inflasi. Kebijakan fiskal harus bertujuan untuk menanggulangi tendensi inflasi yang melekat pada perekonomian sedang berkembang.

Untuk meningkatkan dan meredistribusikan pendapatan nasional. Kebijakan fiskal harus meningkatkan pendapatan nasional dan mendistribusikan kembali pendapatan nasional itu sedemikian rupa sehingga ketimpangan ekstrim dalam pendapatan dan kesejahteraan di dalam perekonomian dapat berkurang.

Adam Smith (Guritno,2001) mengemukakan teori bahwa pemerintah hanya mempunyai tiga fungsi :

- a. fungsi pemerintah untuk memelihara keamanan dalam negeri dan pertahanan
- b. fungsi pemerintah untuk menyelenggarakan peradilan
- c. fungsi pemerintah untuk menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta

Menurut Guritno (2001) dalam perekonomian modern, peran pemerintah dapat di klasifikasikan dalam tiga golongan :

a. Peranan Alokasi

Peranan alokasi yaitu peranan pemerintah dalam alokasi sumber-sumber ekonomi. Tidak semua barang dan jasa yang ada dapat disediakan oleh sektor swasta. Barang dan jasa yang tidak dapat disediakan oleh sistem pasar disebut barang publik, yaitu barang yang tidak dapat disediakan melalui transaksi antara penjual dan pembeli. Barang swasta adalah barang yang dapat disediakan melalui sistem pasar, yaitu melalui transaksi antara penjual dan pembeli. Adanya barang yang tidak dapat disediakan melalui sistem pasar disebabkan oleh adanya

kegagalan sistem pasar. Jadi peranan pemerintah dalam bidang alokasi adalah untuk mengusahakan agar alokasi sumber-sumber ekonomi dilaksanakan secara efisien.

b. Peranan Distribusi

Peranan pemerintah adalah sebagai alat distribusi pendapatan atau kekayaan. Distribusi pendapatan tergantung dari pemilikan faktor-faktor produksi, permintaan dan penawaran faktor produksi, sistem warisan dan kemampuan memperoleh pendapatan. Kemampuan memperoleh pendapatan tergantung dari pendidikan, bakat dan sebagainya, sedangkan warisan tergantung dari hukum yang berlaku.

Distribusi pendapatan dan kekayaan yang ditimbulkan oleh sistem pasar dianggap masyarakat tidak adil. Masalah ketidakadilan tidak sepenuhnya berada dalam ruang lingkup ilmu ekonomi karena masalah keadilan tergantung pada pandangan masyarakat terhadap keadilan itu sendiri. Keadilan bukanlah suatu hal yang statis dan absolut akan tetapi merupakan suatu hal yang dinamis dan relatif, tergantung dari persepsi masyarakat terhadap keadilan. Pemerintah melalui kebijakan fiskal dan moneter merubah keadaan masyarakat sehingga sesuai dengan distribusi pendapatan yang diinginkan oleh masyarakat.

c. Peranan Stabilisasi

Perekonomian yang sepenuhnya diserahkan kepada swasta akan sangat peka terhadap guncangan keadaan yang akan menimbulkan pengangguran dan inflasi. Inflasi merupakan hal yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi, masalah ini

ditangani pemerintah melalui kebijakan moneter. Oleh sebab itu peranan utama pemerintah adalah sebagai alat stabilisasi perekonomian.

2. Teori Pengeluaran Pemerintah

a. Teori Keynes

Teori Keynes mengemukakan bahwa dengan adanya peningkatan pengeluaran pemerintah akan mendorong peningkatan permintaan barang dan jasa secara agregat sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam *The General Theory* (Mankiw, 2003), Keynes menyatakan bahwa pendapatan total perekonomian dalam jangka jangka pendek, sangat ditentukan oleh keinginan rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah untuk membelanjakan pendapatannya. Semakin banyak orang yang mengeluarkan pendapatannya, semakin banyak barang dan jasa yang bisa dijual perusahaan.

Model pendapatan nasional yang dikembangkan oleh JM Keynes untuk perekonomian empat sektor adalah $Y = C + I + G + X - M$ dimana pendapatan nasional (Y) ditentukan oleh beberapa faktor yaitu, tingkat konsumsi nasional (C), investasi (I), pengeluaran pemerintah (G), ekspor (X), impor (M). Dengan mengasumsikan perekonomian tertutup maka net ekspor adalah nol, dan pengeluaran yang direncanakan E adalah jumlah konsumsi C, investasi yang direncanakan I, dan belanja pemerintah G:

$$E = C + I + G \dots\dots\dots(2.1)$$

dan fungsi konsumsi:

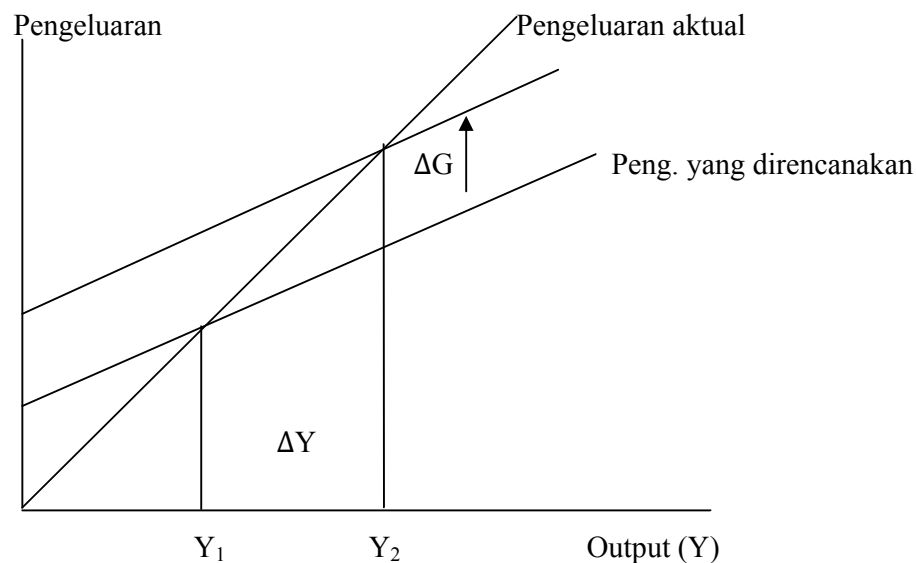
$$C = C(Y - T) \dots\dots\dots(2.2)$$

Persamaan ini menyatakan bahwa konsumsi tergantung pada *disposable income* ($Y - T$), yang merupakan pendapatan dikurangi pajak. Dengan mengasumsikan investasi, kebijakan fiskal tingkat pembelian dan pajak pemerintah adalah tetap, maka persamaaan menjadi:

$$E = C(Y - T) + \bar{I} + \square \dots \dots \dots (2.3)$$

jadi pengeluaran yang direncanakan adalah fungsi pendapatan, tingkat investasi yang direncanakan dan kebijakan fiskal.

Untuk menggambarkan pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi diilustrasikan dengan model perpotongan keynesian seperti terlihat pada gambar 2.1:



Gambar 2.1. perpotongan keynesian

Belanja pemerintah merupakan salah satu komponen pengeluaran, maka pengeluaran pemerintah yang lebih tinggi mengakibatkan pengeluaran yang direncanakan yang lebih tinggi untuk semua tingkat pendapatan. Kenaikan belanja

pemerintah sebesar ΔG meningkatkan pengeluaran yang direncanakan sebesar jumlah itu untuk semua tingkat pendapatan.

Adanya kenaikan belanja pemerintah mendorong kenaikan dalam pendapatan yang lebih besar, yaitu ΔY lebih besar dari ΔG . Rasio $\Delta Y/\Delta G$ disebut pengganda belanja pemerintah. Pendapatan yang lebih tinggi menyebabkan konsumsi yang lebih tinggi. Ketika kenaikan belanja pemerintah meningkatkan pendapatan, juga akan meningkatkan konsumsi yang selanjutnya meningkatkan pendapatan, kemudian meningkatkan konsumsi dan seterusnya. Kenaikan pendapatan akan meningkatkan konsumsi sebesar $MPC \times \Delta G$, dimana MPC adalah kecenderungan mengkonsumsi marjinal. Kenaikan konsumsi ini meningkatkan pengeluaran dan pendapatan sekali lagi, sehingga menjadi $MPC \times (MPC \times \Delta G)$ dan seterusnya. Jadi pengganda belanja pemerintah adalah :

$$\Delta Y/\Delta G = 1 + MPC + MPC^2 + MPC^3 + \dots$$

$$\Delta Y/\Delta G = 1/(1 - MPC) \dots \dots \dots (2.4)$$

3. Pengeluaran Sektor Publik

Pengeluaran sektor publik oleh pemerintah sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, karena sektor publik merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan umum dan penyediaan barang atau jasa kepada publik yang dibiayai dengan pajak atau pendapatan negara yang lain yang diatur melalui hukum. Pihak swasta merasa enggan untuk berinvestasi karena pada umumnya barang dan jasa publik tidak akan memberikan keuntungan.

Untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran tersebut harus didukung oleh ketersediaan anggaran pemerintah. Pengeluaran sektor publik yang sangat penting

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat adalah pengeluaran sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur yang terdiridari infrastruktur transportasi dan penyediaan perumahan untuk rakyat.

3.1 Pengeluaran Sektor Pendidikan terhadap Perekonomian

Pendidikan mempunyai peranan yang penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan mempengaruhi secara penuh pertumbuhan ekonomi bangsa. Hal ini bukan saja karena pendidikan akan berpengaruh terhadap produktivitas, tetapi juga akan berpengaruh terhadap fertilitas masyarakat. Pendidikan menjadikan SDM lebih cepat mengerti dn siap dalam menghadapi perubahan di lingkungan kerja. Oleh karena itu, tidaklah heran apabila negara yang memiliki penduduk dengan tingkat yang tinggi akan mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi yang pesat. Pendidikan memberikan keuntungan ganda, yaitu meningkatkan nilai harga diri dan kemampuan produktivitas yang lebih besar.

Menurut Fattah (2009) sumber daya manusia yang berpendidikan secara bermutu berperan penting dalam merangsang pertumbuhan ekonomi. Sumber daya manusia yang berpendidikan lebih cepat mengerti dan siap dalam menghadapi perubahan dilingkungan kerja. Oleh karena itu tidaklah heran apabila Negara yang memiliki penduduk dengan tingkat pendidikan yang tinggi akan mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi yang pesat.

Pemerintah yang berperan sebagai penyelenggara pelayanan publik, menjalankan fungsinya dengan menetapkan berbagai kebijakan yang diantaranya kebijakan mengenai anggaran. Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara

(APBN) dikenal ada dua jenis anggaran, yaitu anggaran pendapatan dan anggaran pengeluaran pemerintah. Anggaran pengeluaran mencerminkan seberapa besar pengeluaran yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam periode tertentu. Dalam Mangkoesoebroto (2001) dinyatakan bahwa pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Salah satu kebijakan anggaran pengeluaran pemerintah yaitu ketetapan terhadap pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan. Anggaran pendidikan yang memadai akan sangat mempengaruhi mutu pendidikan. Ketentuan anggaran pendidikan tertuang dalam UU No.20 tahun 2003 pasal 49 tentang pengalokasian dana pendidikan yang menyatakan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, anggaran untuk sektor pendidikan sebagian besar berasal dari dana yang diturunkan dari pemerintah pusat ditambah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPDB).

Pengeluaran dalam bidang pendidikan bukan untuk pendidikan itu sendiri, melainkan sebagai bagian integral dari usaha penyiapan tenaga kerja untuk memasuki sektor ekonomi produktif. Oleh karena itu banyak pemerintahan negara serta pakar pendidikan dan ketenagakerjaan berusaha menintegrasikan

perencanaan tenaga kerja dengan pilihan pengeluaran pendidikan yang akan dibuat.

3.2 Pengeluaran Sektor Kesehatan terhadap Perekonomian

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia, tanpa kesehatan manusia tidak dapat melakukan kegiatannya sehari-hari. Kesehatan juga merupakan dasar pembentukan modal sumberdaya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia yang berkualitas dapat meningkatkan produktivitas serta dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Pendidikan dan kesehatan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar. Pada saat yang sama pendidikan memainkan peran kunci dalam membentuk kemampuan yang sebuah negara berkembang untuk menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dan kesehatan merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas, sementara keberhasilan pendidikan juga bertumpu pada kesehatan yang baik. Oleh karena itu, kesehatan dan pendidikan juga dapat dilihat sebagai komponen pertumbuhan dan pembangunan ekonomi (Todaro dan Smith, 2004).

Pemerintah harus lebih memperhatikan sarana kesehatan yang ada. Pemerintah dituntut untuk menyediakan sarana dan prasarana kesehatan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Oleh sebab itu pemerintah harus lebih memperhatikan pengeluarannya untuk sektor kesehatan.

3.3 Pengeluaran Sektor Infrastruktur terhadap Perekonomian

Selain dari pendidikan dan kesehatan untuk pembentukan modal manusia juga dibutuhkan infrastruktur penunjang pembangunan ekonomi. Tak bisa

dipungkiri bahwa infrastruktur merupakan salah satu faktor penunjang keberhasilan perekonomian suatu daerah. Diantara infrastruktur yang sangat penting dalam menunjang perekonomian dan yang sangat dibutuhkan masyarakat yaitu perumahan dan transportasi. Perumahan yang layak akan membuat kualitas hidup masyarakat menjadi lebih baik, sehingga masyarakat dapat melaksanakan kegiatannya sehari-hari. Jaringan transportasi yang baik akan melancarkan distribusi kegiatan ekonomi dan secara jangka panjang dapat menjadi media pemerataan pembangunan.

Menurut Deni (dalam Desi: 2010) ada tiga alasan utama mengapa infrastruktur penting dalam sebuah integrasi ekonomi. Alasan pertama yaitu ketersediaan infrastruktur yang baru merupakan mesin utama pembangunan ekonomi. Kedua, untuk memperoleh manfaat yang penuh dari integrasi, ketersediaan jaringan infrastruktur sangat penting dalam memperlancar aktivitas perdagangan dan investasi. Ketiga, perhatian terhadap perbaikan infrastruktur juga untuk mengatasi kesenjangan pembangunan antar negara. Infrastruktur terdiri dari beberapa subsektor, dan infrastruktur yang penting untuk menunjang kehidupan masyarakat yaitu perumahan dan transportasi.

Ketersediaan infrastruktur merupakan mesin pemicu pertumbuhan ekonomi, disamping itu juga untuk memperlancar aktivitas perdagangan dan investasi. Oleh karena itu pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur harus lebih mendapatkan perhatian lebih. Ketersediaan dan perbaikan infrastruktur juga dapat mengatasi kesenjangan pembangunan antar wilayah. Untuk pemenuhan infrastruktur

pemerintah tidak dapat hanya bergerak sendiri tetapi juga dibutuhkan dukungan serta bantuan dari pihak swasta.

4. Penelitian Sejenis

Penelitian Aula Ahmad (2011) yang berjudul “Analisis Hubungan Pengeluaran Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi dengan menggunakan pendekatan kausalitas granger”, hasil regresi analisis VAR membuktikan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi mempengaruhi pengeluaran pendidikan pada lag ke 1, sedangkan pengeluaran pendidikan baru akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi pada lag ke 3.

Penelitian Abustan (2009) yang berjudul “Analisis Vektor Auto Regressive (VAR) terhadap Korelasi antara Belanja Publik dan Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Selatan” menggunakan variabel APBD dan pertumbuhan ekonomi membuktikan bahwa hubungan kausalitas antara PDRB dan APBD hanya satu arah yakni PDRB sebagai determinan terhadap APBD dan tidak sebaliknya. Berarti bahwa kinerja belanja publik tidak berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

Penelitian Rikwan (2010) yang berjudul “Analisis Kausalitas antara Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara” membuktikan bahwa dari uji kointegrasi menunjukkan adanya hubungan keseimbangan jangka panjang antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara, dari uji Granger Causality tidak ditemukan adanya hubungan timbal balik (kausal) antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara, tetapi memiliki hubungan yang searah, yakni

pengeluaran pemerintah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi selama periode penelitian.

Penelitian di atas memperlihatkan hasil yang berbeda-beda, dua penelitian membuktikan bahwa pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi hanya memiliki hubungan yang satu arah dan tidak terjadinya hubungan kausalitas antara keduanya, sedangkan penelitian penelitian Aulia menunjukkan hubungan yang dua arah antara pengeluaran pendidikan dan pertumbuhan ekonomi. Dalam penelitian peneliti ingin memfokuskan pengeluaran pemerintah di sektor publik, karena pengeluaran sektor publik sangat mempengaruhi produktivitas masyarakat. Peneliti juga ingin membuktikan apakah terdapat hubungan dua arah antara pengeluaran sektor publik dan pertumbuhan ekonomi atau hanya memiliki hubungan yang satu arah.

B. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini dimaksudkan sebagai konsep untuk menjelaskan, mengungkapkan dan menentukan persepsi keterkaitan antara variabel yang diteliti berdasarkan teori yang telah dikemukakan dan rumusan masalah. Keterpautan maupun hubungan antara variabel yang diteliti diuraikan dengan berpijak pada kajian teori.

Pengeluaran sektor pendidikan yaitu total pengeluaran pemerintah sektor pendidikan yang digunakan untuk membiaya seluruh kegiatan pendidikan. Pengeluaran sektor pendidikan dibutuhkan untuk menciptakan masyarakat yang

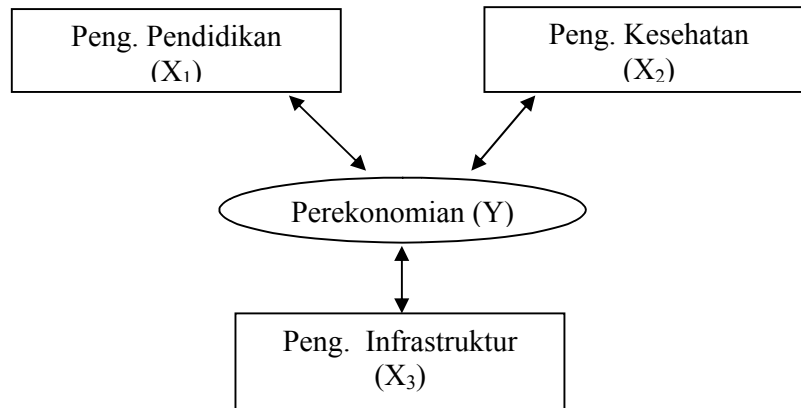
berpendidikan dan meningkatkan produktifitas masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta perekonomian.

Pengeluaran sektor kesehatan juga sangat dibutuhkan selain dari pengeluaran sektor pendidikan. Pengeluaran sektor kesehatan dan pendidikan digunakan untuk pembentukan modal manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia yang berkualitas diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang maksimal.

Pengeluaran sektor infrastruktur yaitu pengeluaran pemerintah untuk menyediakan infrastruktur untuk masyarakat terutama infrastruktur perumahan dan transportasi. Infrastruktur tersebut sangat penting untuk menunjang kegiatan ekonomi masyarakat yang nantinya akan meningkatkan produktivitas masyarakat serta dapat meningkatkan perekonomian.

Perekonomian dilihat dari tingkat pendapatan atau PDRB (*Produk Domestik Regional Bruto*). Kondisi perekonomian yang baik merupakan wujud dari kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi tingkat pendapatan perkapita masyarakat maka itu mencerminkan tingginya tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut. Pendapatan masyarakat ditentukan oleh seberapa besar tingkat produktifitas yang bisa dilakukan oleh masyarakat tersebut. Produktifitas dipengaruhi oleh *human capital* atau kondisi masyarakat itu sendiri seperti tingkat pendidikan dan kesehatan individu masyarakat tersebut. Selain faktor individu masyarakat sarana dan prasarana ekonomi juga dapat mempengaruhi tingkat produktifitas masyarakat, karena dengan kelancaran aktivitas ekonomi dapat meningkatkan produktivitas dan kelancaran produksi.

Secara sistematis, kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.2 berikut:



Gambar 2.2. Kerangka Konseptual

C. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Berdasarkan rumusan masalah dan kajian teori yang telah dikemukakan, adapun hipotesis yang akan dibuktikan yaitu:

1. Terdapat kausalitas secara signifikan antara pengeluaran sektor pendidikan dan perekonomian di Provinsi Sumatera Barat.
2. Terdapat kausalitas secara signifikan antara pengeluaran sektor kesehatan dan perekonomian di Provinsi Sumatera Barat.
3. Terdapat kausalitas secara signifikan antara pengeluaran sektor infrastruktur dan perekonomian di Provinsi Sumatera Barat.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan pada BAB IV dapat diambil simpulan sebagai berikut :

1. Pengeluaran sektor pendidikan berdasarkan analisis VAR tidak mempengaruhi perekonomian, sedangkan perekonomian telah mempengaruhi pengeluaran sektor pendidikan pada *lag* pertama. Hasil ini sejalan dengan uji kausalitas granger yang menunjukkan hanya terdapat hubungan satu arah antara pengeluaran sektor pendidikan dan perekonomian, yaitu hanya perekonomian yang mempengaruhi pengeluaran sektor pendidikan dan tidak sebaliknya.
2. Pengeluaran sektor kesehatan berdasarkan analisis VAR tidak mempengaruhi perekonomian, sedangkan perekonomian telah mempengaruhi pengeluaran sektor kesehatan pada *lag* pertama. Hasil ini sejalan dengan uji kausalitas granger yang menunjukkan hanya terdapat hubungan satu arah antara pengeluaran sektor kesehatan dan perekonomian, yaitu hanya perekonomian yang mempengaruhi pengeluaran sektor kesehatan dan tidak sebaliknya.
3. Pengeluaran sektor infrastruktur berdasarkan analisis VAR tidak mempengaruhi perekonomian, sedangkan perekonomian telah mempengaruhi pengeluaran sektor infrastruktur pada *lag* pertama. Hasil ini sejalan dengan uji kausalitas granger yang menunjukkan hanya terdapat hubungan satu arah antara pengeluaran sektor infrastruktur dan perekonomian, yaitu hanya perekonomian yang mempengaruhi pengeluaran sektor infrastruktur dan tidak sebaliknya.

4. Pandangan Keynesian yang menyatakan bahwa pengaruh perubahan pengeluaran pemerintah akan memberikan dampak yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi karena adanya multiplier berantai tidak dapat dibuktikan di Provinsi Sumatera Barat.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan dari penelitian ini, maka saran yang dapat peneliti ajukan :

1. Pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan harus lebih diperhatikan karena pengeluaran tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa mempengaruhi perekonomian. Pengeluaran sektor pendidikan agar lebih diutamakan untuk program-program pembiayaan pendidikan, seperti pemberian bantuan dana bagi anak-anak kurang mampu serta pemberian buku-buku penunjang pembelajaran, agar anak-anak tersebut dapat belajar. Pemberian bantuan tersebut harus tepat sasaran dan diawasi supaya tidak terjadi kecurangan.
2. Pengeluaran pemerintah untuk sektor kesehatan lebih diutamakan untuk pembangunan puskesmas-puskesmas terdekat di setiap daerah, agar masyarakat tidak lagi terlalu jauh untuk mendapatkan perawatan medis, disamping itu pemberian vaksin dan vitamin bagi masyarakat terutama anak-anak sangat dibutuhkan karena dengan adanya kesehatan maka masyarakat dapat meningkatkan produktivitasnya sehari-hari.

3. Pengeluaran pemerintah Sumatera Barat untuk infrastruktur tidak begitu tampak, pemerintah hanya melakukan perbaikan-perbaikan terhadap infrastruktur yang telah ada dan tidak adanya pembangunan yang berkelanjutan sehingga diharapkan pemerintah untuk mampu menciptakan infrastruktur-infrastruktur publik yang baru guna memperlancar aktivitas masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abustan. 2009. *Analisis Vektor Auto Regressive (VAR) terhadap Korelasi antara Belanja Publik dan Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Selatan*. Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 10, No.1, Juni 2009, hal. 1 – 14
- Ajija dkk. 2011. *Cara Cerdas Menguasai Eviews*. Jakarta: Salemba Empat.
- Aula Ahmad. 2011. *Analisis Hubungan Pengeluaran Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi dengan Menggunakan Pendekatan Kausalitas Granger*. Jurnal Ekonomi dan Pendidikan Volume 8 No. 2, November 2011, Hal 124-141.
- BPS Sumatera Barat. *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah*. Padang: BPS.
- BPS Sumatera Barat. *Sumatera Barat dalam Angka 2008-2012*. Padang: BPS.
- BPS Sumatera Barat. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat*. Padang: BPS.
- Desi. 2010. *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah atas Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. Skripsi
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan. www.djpk.depkeu.go.id
- Fattah, Nanang. 2009. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: Rosda.
- Jhingan. 2012. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mangkoesoebroto, Gurotno. 2001. *Ekonomi Publik Edisi Ketiga*. Yogyakarta : BPFE Yogyakarta.
- Mankiw, N. Gregory. 2003. *Teori Makroekonomi Edisi Kelima*. Jakarta: Erlangga.
- Niken. 2010. *Dampak Investasi Pendidikan terhadap Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di Jawa Tengah*. Jurnal Organisasi dan Manajemen Volume 6 No. 2, September 2010, Hal 158-170.
- Rikhwan. 2010. *Analisis Kausalitas antara Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara*. Jurnal Keuangan dan Bisnis, Volume 2 No.1, Maret 2010.